

DINAMIKA KOLABORASI EKONOMI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM TJSL DI SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

Amara Citta Wibowo^{1*}, Ely Sufianti²,
Politeknik STIA LAN Bandung^{1,2}
Jalan Hayam Wuruk No. 34-38*
amaracitta26@gmail.com*

ABSTRACT

This study examines the collaborative dynamics in the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) in Bandung City, with a particular focus on its role in community-based waste management. Using Emerson, Nabatchi, and Balogh's Collaborative Dynamics framework, this research analyzes how government agencies, private companies, and local communities interact, negotiate roles, and mobilize resources. A qualitative descriptive method was employed, using in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings show that collaborative practices have emerged and are functional, especially in the operational stage of waste transportation; however, several institutional and technical constraints still hinder long-term sustainability. Compared with studies in other Indonesian cities, Bandung's case highlights that collaboration may be strong during implementation but remains limited in agenda-setting and capacity building. This study contributes to the understanding of local collaborative governance in environmental programs and underscores the importance of strengthening institutional capacities, improving communication structures, and ensuring community empowerment for sustainable waste governance.

Keywords: Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL), Collaboration Dynamics, Economic Development, Waste Management, Collaborative Governance, Bandung City

PENDAHULUAN

Bandung merupakan salah satu kota metropolitan dengan aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, dan pertumbuhan usaha yang terus meningkat. Namun, perkembangan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan kota dalam mengelola persoalan lingkungan, terutama terkait penanganan sampah. Kota Bandung beberapa kali mengalami kondisi kedaruratan sampah, salah satunya pada 2023 ketika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mengalami kebakaran dan menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik kota (Ismi, 2023). Situasi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari sektor swasta dan Masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Bandung membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wadah

koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan Masyarakat (Litbang, 2024). Namun, implementasinya masih jauh dari harapan. Dari sekitar 4.000 perusahaan yang tercatat di Kota Bandung, hanya sekitar 3% yang terlibat aktif dalam pelaksanaan TJSL (Mauludy, 2018). Rendahnya partisipasi ini menciptakan kesenjangan antara potensi kontribusi perusahaan dan kebutuhan riil kota, khususnya dalam penanganan sampah dan isu lingkungan lainnya. Selain tingkat partisipasi yang rendah, beberapa persoalan lain turut muncul, seperti keterbatasan transparansi, kurangnya standarisasi program, serta minimnya ruang dialog antara pemangku kepentingan (Erbhasan dan Supratman, 2023).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka regulasi nasional yang sudah kuat dengan implementasi lokal yang masih lemah (Kristian, 2023). Banyak penelitian sebelumnya menyoroti TJSL dari aspek regulasi, kewajiban perusahaan, atau pemanfaatannya sebagai instrumen pembangunan sosial (Anggrainia, 2020). Namun, kajian yang secara khusus membahas bagaimana kolaborasi lintas sektor dijalankan di tingkat kota dan mengapa partisipasi perusahaan tetap rendah meskipun struktur kelembagaannya telah tersedia masih sangat terbatas. Di sinilah research gap penelitian ini secara eksplisit muncul: belum ada kajian yang mengulas dinamika kolaborasi TJSL di Kota Bandung secara mendalam dengan fokus pada rendahnya keterlibatan perusahaan serta hubungannya dengan krisis pengelolaan sampah kota (Dewi, 2019).

Berkaitan dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk:

1. Menganalisis bagaimana kolaborasi dalam Program TJSL dijalankan pada sektor pengelolaan sampah di Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan rendahnya partisipasi perusahaan; dan
3. Merumuskan strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan TJSL agar dapat memberikan dampak nyata bagi perbaikan lingkungan kota.

Penelitian ini memiliki orisinalitas pada pemanfaatan teori Collaborative Governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sebagai alat analisis untuk memahami interaksi antarpihak dalam konteks lokal Bandung (Apriadi et al., 2023). Pendekatan ini memberikan perspektif baru karena sebagian literatur sebelumnya belum menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action berperan dalam membentuk keberhasilan atau kegagalan kolaborasi TJSL di daerah (Feriandy dan Wahyu, 2024).

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang tata kelola kolaboratif dalam implementasi TJSL di tingkat kota, khususnya pada isu pengelolaan sampah. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandung dan Forum TJSL untuk memperkuat struktur koordinasi, meningkatkan transparansi perusahaan, dan memperluas pelibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan dan mendukung ekonomi sirkular.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika TJSL di Kota Bandung serta menjadi rujukan dalam merumuskan strategi kolaborasi yang lebih efektif pada masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam dinamika kolaborasi dalam implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kota Bandung (Ultavia et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami pengalaman, persepsi, serta pola interaksi antaraktor dalam konteks sosial yang alami tanpa menekankan generalisasi statistik. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder yang dikumpulkan dari regulasi, laporan kegiatan, dan dokumen resmi lain yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan TJSL, serta pemahaman mengenai proses kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Lokasi penelitian difokuskan pada Kelurahan Sukamiskin karena wilayah ini merupakan salah satu titik pelaksanaan program, termasuk kegiatan pengelolaan sampah dan bantuan roda sampah, sehingga memungkinkan peneliti mengamati secara langsung bagaimana kolaborasi dijalankan di level komunitas. Selain itu, Sukamiskin memiliki aktor komunitas yang aktif, sehingga interaksi antara Forum TJSL Kota Bandung, perusahaan mitra, dan masyarakat dapat terpantau secara jelas. Meskipun penelitian berfokus pada satu kelurahan, informan seperti Ketua dan Sekretaris Forum TJSL, serta mitra pelaksana seperti Bank BJB dan DPD LPM Kota Bandung, memiliki cakupan kerja pada tingkat kota sehingga perspektif mereka tetap dapat menggambarkan kondisi umum implementasi TJSL di Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung aktivitas di lapangan, serta penelusuran dokumen yang berkaitan dengan program. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang

mencakup proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode (Husnullail et al., 2024) untuk memastikan konsistensi informasi antara wawancara, observasi, dan dokumen, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi dalam pelaksanaan TJSL di Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung menunjukkan dinamika kolaborasi yang terbentuk melalui interaksi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Program ini berawal dari pemetaan kebutuhan fasilitas angkut sampah di beberapa wilayah yang tidak terjangkau armada truk besar, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan roda sampah oleh perusahaan, salah satunya Bank BJB. Setelah penyaluran bantuan, forum pertemuan lintas sektor diselenggarakan untuk membahas aspek teknis seperti mekanisme penggunaan, pembagian tugas, serta penyesuaian jadwal pengangkutan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) turut memberikan masukan berbasis kondisi tiap RW sehingga implementasi di lapangan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Roda sampah yang kemudian dioperasikan masyarakat terbukti mempercepat alur pengangkutan dan membantu kelurahan dalam pemantauan kebersihan.

Analisis penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Dynamics* dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), yang memang relevan untuk membaca proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka yang sistematis untuk melihat bagaimana aktor membangun keterlibatan, motivasi, dan kapasitas bersama. Dalam konteks Bandung, dinamika tersebut menjadi penting karena rendahnya tingkat partisipasi perusahaan hanya sekitar 3% dari total perusahaan yang tercatat menunjukkan adanya masalah koordinasi dan kesenjangan antara regulasi dan praktik. Oleh karena itu, teori ini berguna untuk mengevaluasi apakah tahapan-tahapan kolaborasi sudah berjalan sesuai prinsipnya atau masih terdapat hambatan seperti yang ditemukan di berbagai penelitian lain mengenai kolaborasi TJSL di daerah urban.

Keterlibatan yang Berlandaskan Prinsip (*Principled Engagement*)

Proses komunikasi dan penyusunan agenda di Bandung secara normatif diwadahi melalui Forum TJSL Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Perwal

(Badan Perencanaan Pembangunan, P. dan P. K. B., 2018). Forum ini menjadi kanal resmi bagi dialog lintas sektor, sebagaimana ditemukan juga pada penelitian di Surabaya dan Makassar, di mana forum serupa berfungsi sebagai ruang negosiasi kepentingan antara perusahaan dan pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan Surabaya yang memiliki sekretariat aktif dan jadwal pertemuan rutin, mekanisme pengundangan pada Forum TJSL Bandung masih bersifat mendadak, sehingga beberapa masyarakat atau organisasi tidak dapat terlibat penuh. Kurangnya pelibatan warga dalam tahap perencanaan juga berpotensi melemahkan proses musyawarah dan menyebabkan ketimpangan suara antara masyarakat dan aktor korporasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Primananda (2024) yang menyebutkan bahwa proses partisipasi dalam TJSL di Bandung cenderung formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan dialog setara antaraktor.

Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)

Motivasi kolektif dalam kolaborasi TJSL menguat setelah terjadinya krisis sampah di TPA Sarimukti, yang menimbulkan dampak besar terhadap Kota Bandung. Kondisi emergensi ini menciptakan urgensi bersama sehingga memperkuat keinginan aktor untuk bekerja sama, krisis lingkungan sering kali menjadi pemicu utama terbentuknya kolaborasi lintas sektor (Prakoso, 2017). Komitmen moral dari perusahaan terlihat dari inisiatif pendanaan dan dukungan teknis, walaupun jumlah perusahaan yang aktif masih sangat terbatas. Sementara itu, kepercayaan masyarakat meningkat seiring pelibatan mereka sebagai operator roda sampah, meskipun penghargaan terhadap kontribusi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kekuatan pada aspek motivasi ini menunjukkan bahwa nilai bersama (*shared values*) dapat menjadi fondasi penting apabila kelembagaan kolaborasi diperkuat.

Kapasitas untuk Bertindak Bersama (*Capacity for Joint Action*)

Dibandingkan dengan kota lain seperti Semarang yang telah memiliki sekretariat TJSL permanen, Forum TJSL Bandung masih menghadapi keterbatasan kelembagaan. Ketiadaan sekretariat tetap dan minimnya dukungan anggaran menyebabkan koordinasi bergantung pada relawan dan pejabat kelurahan, sehingga kontinuitas program tidak selalu terjaga. Pembagian peran pada tingkat lapangan sebenarnya sudah berjalan cukup jelas: pemerintah berperan dalam fasilitasi, perusahaan menyediakan sumber daya, dan masyarakat menjalankan operasional.

Namun, tidak adanya sistem insentif dan keterbatasan kemampuan teknis membuat kapasitas masyarakat belum berkembang secara optimal.

Secara keseluruhan, dinamika kolaborasi dalam TJSL Kota Bandung memperlihatkan adanya kemajuan, terutama melalui peningkatan interaksi dan kesadaran bersama terhadap isu pengelolaan sampah. Namun, ketiga dimensi dalam model Emerson menunjukkan bahwa praktik kolaborasi masih belum mencapai bentuk ideal. Keterbatasan struktur kelembagaan, rendahnya tingkat partisipasi perusahaan, dan ketidakmerataan kapasitas aktor menjadi faktor yang menghambat efektivitas program. Penguatan forum sebagai institusi, pembentukan sekretariat, serta pengembangan program pelatihan teknis dan sistem insentif perlu diprioritaskan agar kolaborasi dapat berjalan lebih stabil. Jika ditopang oleh lembaga yang solid dan partisipasi perusahaan yang lebih luas, pengelolaan sampah berbasis TJSL berpotensi menjadi model kolaborasi yang lebih adaptif bagi wilayah urban lainnya di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kota Bandung, khususnya pada aspek pengelolaan sampah, berjalan melalui hubungan kerja sama yang cukup solid antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, meskipun efektivitasnya belum merata. Temuan utama mengonfirmasi bahwa keberadaan Forum TJSL memberikan struktur koordinatif yang penting, tetapi belum diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan operasional yang memadai. Kondisi ini membuat praktik kolaborasi berjalan adaptif, namun belum mencapai konsistensi sebagaimana yang digambarkan dalam kerangka *Collaborative Dynamics* Emerson dkk.

Dari sisi kontribusi ilmiah, penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya misalnya kota Bandung memberikan nuansa berbeda: kolaborasi tumbuh kuat pada tahap implementasi teknis (pendistribusian sarana dan pelibatan masyarakat), tetapi masih lemah pada aspek perumusan agenda dan keberlanjutan pasca-intervensi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa karakteristik sosial dan kelembagaan tiap daerah berpengaruh besar terhadap dinamika kolaborasi, sehingga model “satu formula untuk semua” tidak dapat diterapkan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dan perusahaan pelaksana TJSL. Penguatan kapasitas kolaborasi harus menjadi prioritas, terutama melalui pembentukan sekretariat tetap Forum TJSL, penyediaan pendanaan dasar, serta peningkatan kompetensi masyarakat pelaksana

melalui pelatihan teknis yang relevan dengan konteks wilayah. Langkah ini tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga menjadi dasar keberlanjutan program jangka panjang. Selain itu, praktik baik yang muncul dari implementasi di Sukamiskin dapat dikembangkan menjadi *local model* yang dapat direplikasi di wilayah Bandung lainnya maupun kota lain dengan kondisi serupa.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana kolaborasi multipihak di tingkat lokal bekerja dalam konteks TJSL, serta menegaskan bahwa keberhasilan program lingkungan sangat bergantung pada keselarasan kepentingan, kekuatan struktur koordinatif, serta keberlanjutan kapasitas masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kota lain yang tengah mendorong model pembangunan kolaboratif berbasis TJSL untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penelitian ini membuka peluang pengembangan kajian lebih lanjut yang dapat diarahkan pada evaluasi efektivitas dan keberlanjutan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menggunakan indikator kinerja kolaboratif yang lebih terukur. Penelitian mendatang juga dapat memperluas lingkup kajian dengan membandingkan dinamika kolaborasi TJSL di Kota Bandung dengan daerah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Selain itu, pendekatan kuantitatif maupun metode *mixed methods* dapat digunakan untuk melengkapi temuan kualitatif sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dalam menilai dampak program terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Penelitian lanjutan juga berpotensi mengkaji peran teknologi digital dalam mendukung komunikasi dan koordinasi multipihak, serta menelaah strategi penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Dengan demikian, arah pengembangan penelitian ke depan diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan dan strategi implementasi TJSL yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anggrainia, C. (2020). *Pengaruh Implementasi CSR Terhadap Persepsi Stakeholder*.
 Apriadi, Y., Wanto, A., & Novita, A. (2023). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Awal Collaborative Governance Dalam Pemetaan Wilayah Adat di Kabupaten Sorong Selatan*.

- Badan Perencanaan Pembangunan, P. dan P. K. B. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Bandung*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*.
- Dewi, N. L. (2019). *Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik*.
- Erbhasan, R., & Supratman, L. (2023). *Tantangan Implementasi Corporate Social Responsibility Perusahaan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022*.
- Ferandy, & Wahyu, E. (2024). *Dinamika Kolaborasi Tim dan Efisiensi Kerja: Kunci Keberhasilan Pencapaian Tujuan Organisasi*.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M., & Asbui. (2024). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah*.
- Ismi, F. (2023, October 2). *Pj. Wali Kota Bandung Ajak Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Atasi Sampah dan Banjir*.
- Kristian, I. (2023). *Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia*.
- Litbang. (2024). *Forum TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Kota Bandung*. <https://litbang.bandung.go.id/Detail-Hasil-Inovasi/Forum-Tjsl-Tanggung-Jawab-Sosial-Dan-Lingkungan-Kota-Bandung>.
- Mauludy, M. (2018, July 24). *Ribuan Potensi Program CSR Belum Tersentuh*. <https://www.pikiran-rakyat.com/Bandung-Raya/Pr-01299539/Ribuan-Potensi-Program-Csr-Belum-Tersentuh-427771>.
- Prakoso, C. (2017). *Kerjasama Antara Pemerintah, Perusahaan Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Kota Bontang*.
- Primananda, R. (2024, March 8). *Pemkot ajak swasta ikut serta bangun Kota Bandung lewat dana CSR*. <https://www.antaranews.com/Berita/4001412/Pemkot-Ajak-Swasta-Ikut-Serta-Bangun-Kota-Bandung-Lewat-Dana-Csr>.
- Ultavia, A., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). *Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*.